

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi sekaligus subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.

Sumatera berdasarkan luas merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi garis khatulistiwa, seolah membagi Sumatera atas dua bagian, Sumatera belahan bumi utara dan Sumatera belahan bumi selatan. Pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 m di atas permukaan laut, merupakan barisan gunung berapi aktif, membentang sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan; sehingga membuat daratan di sisi barat relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudera Hindia dan dataran di sisi timur yang luas dan landai dengan pantai yang landai dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka dan Laut Cina Selatan. Di bagian utara berbatasan dengan laut Andaman dan di bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Sumatera ditutupi oleh hutan tropik primer dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gunung berapi yang tertinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan dengan gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Leuser di Aceh dan Gunung Dempo di perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu.

Sumatera merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi di sepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatera; dan patahan kerak bumi di dasar Samudera Hindia di sepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera.

Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Secara geografis Sumatera berada di posisi 6°LU - 6°LS dan di antara 95°BT - 109°BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sumatera dengan luas 473.481 km², terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan (Sumatera Utara), Sungai Siak (Riau), Kampar,

Indragiri (Sumatera Barat, Riau), Batang Hari (Sumatera Barat, Jambi), Musi, Ogan, Lematang, Komering (Sumatera Selatan), Way Sekampung, Way Tulangbawang, Way Seputih dan Way Mesuji (Lampung). Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat pulau Sumatera diantaranya Batang Tarusan (Sumatera Barat) dan Ketahun (Bengkulu).

Di bagian barat, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, di pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, diantaranya Danau Laut Tawar (Aceh), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi) dan Danau Ranau (Lampung dan Sumatera Selatan).

4.2 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Berikut di dalam tabel 4.1 akan ditampilkan deskriptif variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jumlah observasi (N), rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------------------------------------|-----|---------|---------|------------|----------------|
| Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 111 | .03332 | .49512 | .1171614 | .07831912 |
| Ukuran Pemerintah Daerah | 111 | 12.707 | 880.000 | 209.61632 | 152.913107 |
| Tingkat Ketergantungan Belanja Daerah | 111 | .36783 | .87092 | .7334708 | .08112931 |
| Opini Audit | 111 | 654944 | 5451085 | 1406068.50 | 778735.145 |
| Valid N (listwise) | 111 | 1 | 5 | 4.62 | .864 |

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil dari statistik deskriptif dari 111 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,1171614%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah paling rendah yaitu dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 0,3332% dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tertinggi yaitu

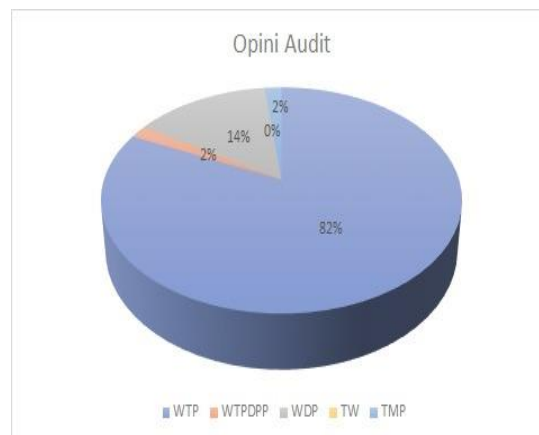
dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Batam sebesar 0,49512%, dengan standar deviasi dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,07831912%.

Nilai rata-rata Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebesar 209.616.32jt. Nilai Ukuran Pemerintah Daerah terendah dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Sibolga sebesar 12.707jt dan nilai Ukuran Pemerintah Daerah tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Medan yaitu sebesar 880.000jt, dengan tingkat deviasi sebesar 152.913.107jt.

Dilihat dari nilai rata-rata Tingkat Ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah sebesar 0,7334708%. Nilai terendah dari Tingkat Ketergantungan adalah 0,36783% yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Batam dan nilai tertinggi dari Tingkat Ketergantungan dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pagar Alam yaitu sebesar 0,87092%, dengan standar deviasi 0,08112931%.

Nilai rata-rata Belanja Daerah adalah sebesar 1.406.068,50. Nilai terendah dari Belanja Daerah dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Sabang sebesar 654.944 dan nilai tertinggi dari Belanja Daerah yaitu dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Medan sebesar 5.451.085, dengan tingkat deviasi sebesar 778.735.145. Nilai rata-rata Opini Audit adalah sebesar 4,62. Nilai terendah dari Opini Audit sebesar 1 dan nilai tertinggi dari Opini Audit yaitu 5, dengan tingkat deviasi sebesar 0,864.

Gambar 4.1
Opini Audit



Berdasarkan gambar 4.1 dari pengolahan data yang sudah dilakukan, bahwa terdapat WTP sejumlah 91 Kabupaten/Kota, WTP-DPP sejumlah 2 Kabupaten/Kota, WDP sejumlah 16 Kabupaten/Kota, TW sejumlah 0 Kabupaten/Kota dan TMP sejumlah 2 Kabupaten/Kota.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2013, hlm. 139).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parameter Kolmogorov-Smirnov (K-S). Setelah dilakukan uji K-S kita dapat menarik kesimpulan, jika nilai sig. atau probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal, dan jika angka probabilitas $> 0,05$, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil seperti terlihat pada table 4.2

Pada tabel 4.2 dapat dilihat hasil uji normalitas nilai K-S 0,083 dengan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,055, berarti *Asymp. Sig 2 tailed* $> \alpha 5\%$ (0,05) dapat dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 111 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .02704632 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .083 |
| | Positive | .073 |
| | Negative | -.083 |
| Test Statistic | | .083 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .055 ^c |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).

Putri Irma, 2020

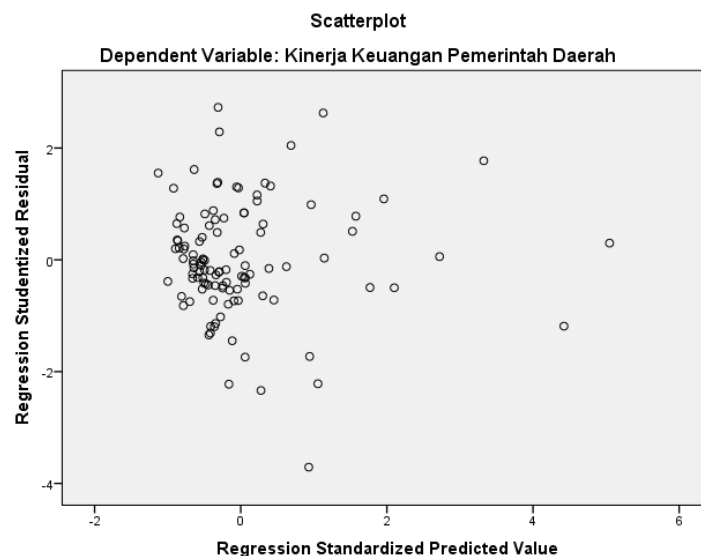
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksinya dapat dilihat pada gambar grafik scatter plot, apabila ada pola- pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila tidak ada pola yang jelas serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh gambar seperti terlihat pada gambar 4.2

Dari grafik *scatterplot* 4.2 terlihat bahwa titik-titik tidak terlalu menyebar secara acak, namun dengan jelas terlihat tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, tidak berkumpul dan memenuhi satu tempat saja serta tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu, tempat titik menyebar secara acak serta data menyebar secara merata diatas sumbu X maupun di atas sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) guna mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dari lawannya dan

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2011:160). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil seperti pada tabel 4.3. Terlihat bahwa variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance value* di atas 0,10. Dari hasil SPSS diatas dapat disimpulkan bahwa independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga proses pengolahan data selanjutnya dapat dilakukan.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

| Model | Collinearity Statistics | |
|--------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Ukuran Pemerintah Daerah | .230 | 4.346 |
| Tingkat Ketergantungan | .498 | 2.007 |
| Belanja Daerah | .249 | 4.013 |
| Opini Audit | .971 | 1.030 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel autokorelasi berikut ini.

Tabel 4.4
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

| | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| Hipotesis Nol | Keputusan | Jika |
|----------------------|------------------|-------------|

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < dl$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | No decision | $Dl \leq d \leq du$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4 - dl < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | No decision | $D - du \leq d \leq 4 - dl$ |
| Tidak ada autokorelasi, positif atau negative | Tidak ditolak | $Du < d < 4 - du$ |

Sumber: Ghozali, 2013

Penelitian ini menggunakan Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4.5. Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,669 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, hasil perhitungan yaitu 1,787 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,669 kurang dari (4-du) $4 - 1,669 = 2,331$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson di atas, adapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji penelitian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .947 ^a | .896 | .892 | .02571511 | 1.669 |

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Tingkat Ketergantungan, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.4 Analisis Linear Berganda

Menurut Ghozali (2013:96) analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan skala pengukuran yang bersifat metrik (interval atau rasio) untuk kedua variabel tersebut. Analisis linier berganda adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang akan diuji dengan signifikansi.

Dengan hasil program SPSS Versi. 22, koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | .838 | .040 | | 21.199 | .000 | | |
| Ukuran Pemerintah Daerah | .001 | .000 | 1.222 | 18.730 | .000 | .230 | 4.346 |
| Tingkat Ketergantungan | .962 | .043 | .996 | 22.468 | .000 | .498 | 2.007 |
| Belanja Daerah | 9.111 | .000 | .906 | 14.444 | .000 | .249 | 4.013 |
| Opini Audit | .003 | .003 | .030 | .934 | .353 | .971 | 1.030 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

Dari hasil pengolahan data SPSS diatas, didapat nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai bisa digunakan. Pada tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 0,838 + 0,001X_1 + 0,962X_2 + 9,111X_3 + 0,003X_4$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

- α = Konstanta
 X_1 = Ukuran (size) Pemerintah Daerah
 X_2 = Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
 X_3 = Belanja Daerah
 X_4 = Opini Audit

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,838. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Opini Audit adalah nol maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah sebesar konstanta 0,838.

b. Koefisien Regresi (β) X_1

Nilai koefisien regresi variabel Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0,001 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan nilai di bawah 0,05.

c. Koefisien Regresi (β) X_2

Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 0,962 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan nilai di bawah 0,05.

d. Koefisien Regresi (β) X_3

Nilai koefisien regresi variabel Belanja Daerah sebesar 9,111 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja

Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan nilai dibawah 0,05.

e. Koefisien Regresi (β) X_4

Nilai koefisien regresi variabel Opini Audit sebesar 0,003 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan nilai diatas 0,05.

4.5 Uji R^2 atau Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan SPSS versi 22 akan diperoleh Adjusted Square (R^2). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi berarti menunjukkan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini. Berdasarkan output SPSS dapat dilihat bahwa dari perhitungan diperoleh Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,947. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar presentase Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit sebesar 94,7%, sedangkan sisanya sebesar 5,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel Tabel 4.7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .947 ^a | .896 | .892 | .02571511 | 1.669 |

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Tingkat Ketergantungan, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikan (p -value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil output SPSS versi 22 dapat dilihat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota ditunjukkan pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Uji t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .838 | .040 | | 21.199 | .000 |
| Ukuran Pemerintah Daerah | .001 | .000 | 1.222 | 18.730 | .000 |
| Tingkat Ketergantungan | .962 | .043 | .996 | 22.468 | .000 |
| Belanja Daerah | 9.111 | .000 | .906 | 14.444 | .000 |
| Opini Audit | .003 | .003 | .030 | -.934 | .353 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

Dari hasil uji t diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.8, Nilai $p = 0,000 \leq 0,05$, maka hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Ukuran Pemerintah Daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat **diterima**. **Ha diterima artinya terdapat pengaruh signifikan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

b) Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai $p = 0,000 \geq 0,05$, maka hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,962 dan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat **diterima**. **Ha diterima artinya terdapat pengaruh signifikan Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

c) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai $p = 0,000 \leq 0,05$, maka hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Belanja Daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 9,111 dan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat **diterima**. **Ha diterima artinya terdapat pengaruh signifikan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

d) Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai $p = 0.353 \geq 0,05$, maka hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Opini Audit dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,003 dan nilai probabilitas 0,353 besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat **ditolak**. **Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F atau uji ANOVA)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 228,589 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima ada pengaruh secara simultan antara Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dapat berpengaruh yang signifikan variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji F
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | .605 | 4 | .151 | 228.589 | .000 ^b |
| Residual | .070 | 106 | .001 | | |
| Total | .675 | 110 | | | |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b. Predictors: (Constant), Opini Audit, Tingkat Ketergantungan, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Olahan SPSS. Versi 22, 2020

4.7 Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan melalui berbagai uji diatas, maka didapatkan pembahasan yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembuktian bahwa variabel bahwa Ukuran Pemerintah Daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar sebesar 0,001 dan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan Ukuran Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Risma Diri Artha, dkk (2015) yang menyatakan Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif.

Ukuran (size) merupakan skala yang digunakan untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu pengukuran dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi size menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas (Surepno, 2013).

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aktiva/aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran (size) daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah tersebut (Mustikarini dan Fitasari, 2012).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar.

Pemerintah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013).

b. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembuktian bahwa variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,318 dan nilai probabilitas 0,000 besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatas Ridho Nugroho, dkk (2018) yang menyatakan Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang No. 33 Tahun 2014). Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan DAU agar supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat (Sudarsana, 2013).

c. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembuktian bahwa variabel bahwa Belanja Daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 9,111 dan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan Belanja Daerah pada Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatas Ridho Nugroho, dkk (2018), Priyan Mrdya Kusuma, dkk (2017) yang menyatakan Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerah.

d. Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembuktian bahwa variabel bahwa Opini Audit dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,003

dan nilai probabilitas 0,353 besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan Opini Audit tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyan Mrdya Kusuma, dkk (2017) yang menyatakan Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan audit BPK berisikan mengenai kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

e. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera.

Hasil pengujian hipotesis kelima diperoleh bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembuktian bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan nilai Fhitung sebesar 228,589 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Dan Opini Audit dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera secara bersamaan.